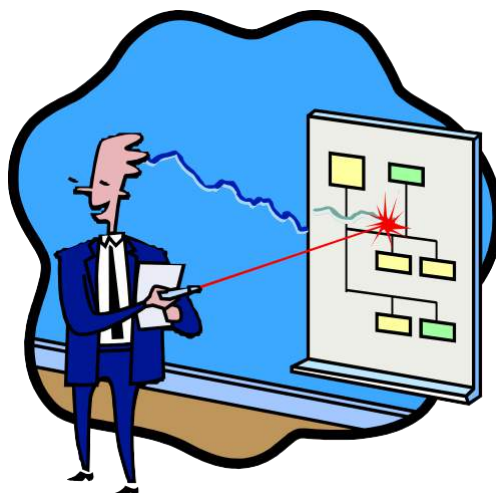


PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG**



TANJUNGPANDAN, 18 JULI 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat terlaksana.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dalam Perubahan Renja ini juga mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026.

Perubahan Rencana Kerja dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sampai dengan bulan Juni 2024 atau di Triwulan II, Perubahan Rencana Kerja disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan perubahan 2024

Harapan kami semoga Perubahan Renja ini bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tanjungpandan, 18 Juli 2024

KEPALA DINAS,

KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690824 199003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II 2024	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
2.4. Review terhadap Perubahan RKPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Bab V PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Perubahan Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Perubahan Renja ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 10 Seri E);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
33. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026;
34. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026;
35. Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 - 2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk

1. Menselaraskan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD tahun 2024
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana kerja Anggaran (RKA)

- 3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan Pelayanan
- 4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Capaian Kinerja Sasaran

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah :

1. **Meningkatnya kesejahteraan PMKS**, yang diukur dengan indikator sasaran **“Persentase penurunan PMKS per tahun”**. Target dari persentase penurunan PMKS pertahun adalah 0,5. Dari hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tercapai 34,31% (terdapat penurunan dari jumlah PMKS dari tahun sebelumnya yaitu 11.986 menjadi 7873 di Triwulan II tahun 2024).
2. **Meningkatnya penanganan PMKS**, yang diukur dengan indikator sasaran **“Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan”**. .Capaian indikator di triwulan II tahun 2024 yaitu 95,86% dari target 98,79%.
3. **Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan**, yang diukur dengan indikator sasaran **“Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)”**, dengan target capaian 53,43. Capaian di Triwulan II adalah masih sama nilainya dengan IDG tahun lalu yaitu 53,43 (Sumber Data dari BPS).
4. **Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan**, yang diukur dengan indikator sasaran **“Level Anugrah Parahita Ekapraya (APE)”** dan target Madya. Capaian di Triwulan II dari indikator ini adalah Pratama, masih menggunakan capaian tahun sebelumnya, dikarenakan tahun 2024 tidak adanya penilaian APE dari Kementerian PPA RI (Penilaian APE dilakukan dua tahun sekali).
5. **Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak** dari tindak kekerasan, yang diukur dengan indikator **“Rasio kekerasan perempuan dan anak”** dan target kinerja 3,2. Capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dari indikator ini adalah 0,01 (indikator negatif).

Adapun dalam bentuk tabel kami sajikan evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Triwulan II Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Keterangan
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	0.5	18.39	0.5	34,31	
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80%	98.29%	98,79%	95,86	
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	47	53,42	53,43	53,43	
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	-	-	Madya	Pratama	
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan perempuan dan anak	-	-	3,2	0,01	

Terhadap sasaran program tahun 2024, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 13 Program, yang terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Program, Sasaran, Indikator, Terget 2023, Realisasi 2023, dan Target 2024 serta Realisasi Triwulan II tahun 2024

No.	Program	Sasaran Program	Indikator	2023		2024		Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi Tw 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	
			2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%	78,70%	78.80%	78.80%	
			3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	
			4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	0%	

No.	Program	Sasaran Program	Indikator	2023		2024		Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi Tw 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			aparatur					
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Terlaksananya program pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100%	38.60%	100%	88.77%	
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan untuk dipulangkan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya	-	-	100%	100%	
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya layanan sosial rehabilitasi sosial dasar	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100	100	100	100	
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100	88.31	100	87.93	
6.	Program Penanganan Bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	100	
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata	100	100	100	100	
8.	Program Pengaru sutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penerapan strategi dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0.5	48.48	36	-	
9.	Program Perlindungan Perempuan	Terlaksananya layanan perlindungan perempuan	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan	100	100	100	100	
10.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang terlayani	Persentase keluarga yang terlayani	100	100	100	100	

No.	Program	Sasaran Program	Indikator	2023		2024		Keterangan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi Tw 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tersedianya data gender dan anak	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	25	75	65	-	
12.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Madya	Madya	Madya	
13.	Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100	100	

2.1.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II (s.d. Juni 2024) sebagai berikut :

Keterikatan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 dari program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat dalam laporan realisasi fisik dan keuangan dan laporan evaluasi renja triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG
PERIODE BULAN 30 JUNI 2024

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	PLAFOND ANGGARAN (APBB)		DATA KONTRAK					REALISASI			SISA ANGGARAN		LOKASI KEGIATAN	SET
				INSUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SWAKELOLA (PENYEDIA)	KONTRAK AWAL (PENYEDIA A. NOMOR)	KONTRAK PERUBAHAN (PENYEDIA A. NOMOR)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI AMANDEMEN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)		
1	2	3	4	10	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Program Pemangajuran Pemerintah Daerah Kabupaten Kota			6.265.661.441	-	-	-	-	6.265.661.441	-	2.967.664.759	47,35	17,41	3.298.016.683	90,69		
		Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.995.000	-	-	-	-	4.995.000	-	-	0,00	0,00	4.995.000	100,00		
1		Penyusunan Dokumen Pemecatan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Pemecatan Perangkat Daerah	2.995.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	2.995.000	-	-	0,00	0,00	2.995.000	100,00		
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	2.000.000	-	-	0,00	0,00	2.000.000	100,00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.131.251.841	-	-	-	-	5.131.251.841	-	2.728.700.190	53,18	25,68	2.402.551.651	73,40		
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.128.251.841	-	Swakelola	-	-	5.128.251.841	-	2.728.700.190	53,21	25,68	2.399.551.651	46,79		
4		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	3.000.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	3.000.000	-	-	0,00	0,00	3.000.000	100,00		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	16.450.380	56,39	28,68	23.549.620	100,00		
5		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat Pelindung Diri	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat Pelindung Diri	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	0,00	0,00	15.000.000	100,00		
6		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Swastakarya Tugas Dan Fungsi	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Swastakarya Tugas Dan Fungsi	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	16.520.380	42,08	58,68	14.479.620	100,00		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		368.337.488	-	-	-	-	368.337.488	-	158.688.471	54,93	28,77	209.649.017	78,81		
7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	10.000.000	-	-	0,00	0,00	10.000.000	100,00		
8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.620.300	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	20.620.300	-	8.183.300	16,37	58,68	42.437.000	83,62		
9		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	14.000.000	-	-	0,00	0,00	14.000.000	100,00		
10		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.453.800	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	119.453.800	-	27.620.800	31,32	28,68	81.833.000	68,68		
11		Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	40.700.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	40.700.000	-	-	0,00	0,00	40.700.000	100,00		

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	PLAFOND ANGGARAN (APBD)		DATA KONTRAK					REALISASI			SISA ANGGARAN		LOKASI KEGIATAN	KET
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SWAKELOLA (PENYEDIA)	KONTRAK AWAL (PERENCANAAN, NOMOR)	KONTRAK PERUBAHAN (PENYEDIA, NOMOR)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI AMANAH MEN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FINIS (%)	RUPIAH	(%)		
1	2	3	4	10	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12		Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perantara-undangan	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perantara-undangan	1.000.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	1.000.000	-	2.173.000	43,50	50,00	2.823.000	96,50		
13		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.561.100	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	128.561.100	-	80.650.071	82,75	50,00	47.911.029	97,25		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		39.648.000	-				39.648.000	-	-	0,00	0,00	39.648.000	100,00		
14		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.648.000	-				39.648.000	-	-	0,00	0,00	39.648.000	100,00		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		228.683.000	-				228.683.000	-	95.423.717	43,24	55,33	133.259.283	69,14		
15		Pelayanan Jasa Jasa Marowati	Pelayanan Jasa Jasa Marowati	1.000.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	1.000.000	-	-	0,00	0,00	1.000.000	100,00		
16		Penyediaan Jasa Koordinasi, Survei Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Koordinasi, Survei Daya Air dan Listrik	51.600.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	51.600.000	-	28.284.217	50,96	50,00	23.315.783	49,04		
17		Pelayanan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Pelayanan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	189.083.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	189.083.000	-	89.129.300	43,62	50,00	99.953.700	56,38		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		488.780.000	-				488.780.000	-	2.562.000	0,49	10,89	486.218.000	101,96		
18		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.000.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	48.000.000	-	-	0,00	0,00	48.000.000	100,00		
19		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.250.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	159.250.000	-	2.262.000	1,42	50,00	156.988.000	98,58		
20		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	1.500.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	1.500.000	-	-	0,00	0,00	1.500.000	100,00		
21		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	30.000.000	-	-	0,00	0,00	30.000.000	100,00		
22		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.000.000	-	Swakelola (Penyedia)	-	-	220.000.000	-	-	0,00	0,00	220.000.000	100,00		

NO	NAMA PROGRAM	NAMA REGISTASI / SUB REGISTASI	NAMA PAKET PEKERJAAN	PLAFOND ANGGARAN (APBD)		DATA KONTRAK					REALISASI			SISA ANGGARAN		LOKASI KEGIATAN	KET
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SWAKELOLA (PENYEDIA)	KONTPAK AWAL (PERSEDIA A. NOMOR)	KONTPAK PERUBAHAN (PENYEDIA NOMOR)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI AMANAH MEN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KTU (%)	FISKAL (%)	RUPIAH	(%)		
1	2	3	4	10	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Program Pemberdayaan Sosial			227.434.400	-				227.434.400	-	25.995.750	11,43	26,67	201.438.650	88,56		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota		227.434.400	-				227.434.400	-	25.995.750	11,43	26,67	201.438.650	88,56		
23		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kemasyarakatan Kabupaten Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kemasyarakatan Kabupaten Kota	5.139.000	-	Swakelola (Pegadaia)		-	5.139.000	-	540.000	9,41	20,00	5.189.000	98,59		
24		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kecamatan Kabupaten Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kecamatan Kabupaten Kota	151.173.500	-	Swakelola (Pegadaia)		-	151.173.500	-	540.000	0,41	25,00	150.633.500	99,59		
25		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKS)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKS)	90.518.900	-	Swakelola (Pegadaia)		-	90.518.900	-	24.911.750	27,53	35,00	65.607.150	72,47		
3	Program Pemangsaan Warga Negara Migran Korban Tindak			47.256.200	-				47.256.200	-	2.800.000	5,90	10,00	44.456.200	94,10		
		Pemangsaan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Dekat/Di Dalam Kabupaten Kota Untuk Dipindahkan Ke Desa/Kelurahan Asal		47.256.200	-				47.256.200	-	2.800.000	5,90	10,00	44.456.200	94,10		
26		Fasilitas Pemangsaan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Dekat/Di Dalam Kabupaten Kota Untuk Dipindahkan Ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitas Pemangsaan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Dekat/Di Dalam Kabupaten Kota Untuk Dipindahkan Ke Desa/Kelurahan Asal	47.256.200	-				47.256.200	-	2.800.000	5,90	10,00	44.456.200	94,10		
4	Program Rehabilitasi Sosial			396.848.250	-				396.848.250	-	218.943.750	55,17	32,40	187.904.500	46,72		
		Rehabilitasi Sosial Daerah Penyandang Disabilitas Teknis, Aspek Teknis, Lanjut Usia Teknis, serta Gelombang Pengasah di Luar Panti Sosial		396.848.250	-				396.848.250	-	218.943.750	55,17	32,40	187.904.500	46,72		
27		Penyediaan Peralatan	Penyediaan Peralatan	210.631.000	-	Swakelola (Pegadaia)		-	210.631.000	-	197.201.000	93,62	95,00	13.429.000	6,38		
28		Pendukung Pelayanan Kesehatan Keluarga	Pendukung Pelayanan Kesehatan Keluarga	11.348.750	-	Swakelola (Pegadaia)		-	11.348.750	-	2.407.500	21,22	30,00	8.941.250	78,78		

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	PLAFOND ANGGARAN (APBD)		DATA KONTRAK					REALISASI			SISA ANGGARAN		LOKASI KEGIATAN	KET
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SWAKELOLA (PENYEDIA)	KONTRAK AWAL (PENYEDIA A. NOMOR)	KONTRAK PERUBAHAN (PENYEDIA B. NOMOR)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI AMANAH MEN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	PSIK (%)	RUPIAH	(%)		
29		Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	84.686.000	-				84.686.000		15.714.250	18,56	25,66	48.971.750	81,44		
30		Pemberian Layanan Koderisasi	Pemberian Layanan Koderisasi	32.978.000	-				32.978.000		-	0,00	1,00	32.978.000	100,00		
31		Pemberian Layanan Rajukan	Pemberian Layanan Rajukan	48.812.500	-	Swakelola (Penyedia)			48.812.500	-	3.409.000	7,84	10,66	45.403.500	92,66		
5	Program Peningkatan dan Jaminan Sosial			677.334.000	-				677.334.000	-	38.708.500	12,11	18,72	6.913.500	96,03		
		Pembelajaran Anak-Anak Terlantar		23.258.100	-				23.258.100	-	1.088.000	4,64	12,58	6.913.500	96,03		
32		Pengajaran Anak-Anak Terlantar	Pengajaran Anak-Anak Terlantar	7.993.500	-				7.993.500		1.088.000	13,51	25,00	4.913.500	100,00		
33		Kajian Anak-Anak Terlantar	Kajian Anak-Anak Terlantar	13.264.600	-				13.264.600		-	0,00	0,00	13.264.600	100,00		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Calon Pemilih Kabupaten Kota		684.078.900	-				684.078.900		97.628.400	14,93	15,43	486.450.500	100,00		
34		Pengelolaan Data Fakir Miskin Calon Pemilih Kabupaten Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Calon Pemilih Kabupaten Kota	392.718.200	-	Swakelola (Penyedia)			392.718.200	-	97.628.330	24,86	24,86	295.089.870	75,14		
35		Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	261.357.750	-	Swakelola (Penyedia)			261.357.750	-	-	0,00	0,00	261.357.750	100,00		
6	Program Penguatan Bantuan			424.517.700	-				424.517.700	-	136.237.900	32,09	40,68	288.279.800	67,91		
		Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Bantuan Kabupaten Kota		424.517.700	-				424.517.700	-	136.237.900	32,09	40,68	288.279.800	67,91		
36		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Sapi Bantuan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Sapi Bantuan	424.517.700	-	Swakelola (Penyedia)			424.517.700	-	136.237.900	32,09	40,68	288.279.800	67,91		
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			11.325.400	-				11.325.400	-	324.000	2,86	20,00	11.001.400	97,14		
		Pembelajaran Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota		11.325.400	-				11.325.400	-	324.000	2,86	20,00	11.001.400	97,14		
37		Pembelajaran Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Pembelajaran Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	11.325.400	-	Swakelola (Penyedia)			11.325.400	-	324.000	2,86	20,00	11.001.400	97,14		

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PASIT PEKERJAAN	PLAFOND ANGGARAN (APBD)		DATA KONTRAK					REALISASI			SISA ANGGARAN		LOKASI KEGIATAN	SET
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SWAKELOLA (PENYEDIA)	KONTRAK AWAL (PERUYDA A. NOMOR)	KONTRAK PERUBAHAN (PENYEDIA B. NOMOR)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI AMANAH MEN (Rp)	KUANGAN (Rp)	KU (%)	FIK (%)	SUPAH	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Program			439.495.000	-				439.495.000	-	111.708.484	24,84	26,97	327.786.516	75,15		
	Program	Pelaksanaan Program		36.326.000	-				36.326.000	-	19.748.889	54,36	54,36	16.577.111	45,64		
38		Koordinasi dan	Koordinasi dan	36.326.000	-	Swakelola		-	36.326.000	-	19.748.889	54,36	54,36	16.577.111	45,64		
		Penyusunan	Penyusunan	379.497.000	-				379.497.000	-	92.040.484	24,84	24,84	278.457.416	75,15		
39		Advisi	Advisi	379.497.000	-	Swakelola		-	379.497.000	-	92.040.484	24,84	24,84	278.457.416	75,15		
		Penggunaan dan	Penggunaan dan	31.678.000	-				31.678.000	-	-	0,00	1,72	31.678.000	100,00		
40		Advisi	Advisi	18.993.000	-	Swakelola		-	18.993.000	-	-	0,00	0,00	18.993.000	100,00		
41		Penggunaan dan	Penggunaan dan	15.682.000	-				15.682.000	-	-	0,00	5,44	15.682.000	100,00		
9.	Program			679.878.000	-				679.878.000	-	-	0,00	42,46	71.668.388	100,00		
		Penerapan	Penerapan	71.668.388	-				71.668.388	-	-	0,00	88,06	71.668.388	100,00		
42		Koordinasi dan	Koordinasi dan	71.668.388	-	Swakelola		-	71.668.388	-	-	0,00	17,06	71.668.388	100,00		

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PASER PEKERJAAN	PLAFOND ANGGARAN (APBD)		DATA KONTRAK					REALISASI			SISA ANGGARAN		LOKASI KEGIATAN	KET
				DUPUS (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SWAKELOLA (PENYEDIA)	KONTRAK AWAL (PENYEDIA A. NOMOR)	KONTRAK PERUBAHAN (PENYEDIA B. NOMOR)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI AMANDEMEN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KET (%)	PISEK (%)	RUPIAH	(%)		
1	2	3	4	10	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Menuntutkan Keurifinan Kewenangan Kabupaten Kota		604.907.000	-				604.907.000	-	-	0,00	20,00	604.907.000	100,00		
43		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	604.907.000	-				604.907.000	-	-	0,00	20,00	604.907.000	100,00		
10.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			21.797.500	-				21.797.500	-	-	4,81	8,80	21.797.500	100,00		
		Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Menunjang Kemandirian Anak Yang Wilayah Kegiatannya Dalam Daerah Kabupaten Kota		21.797.500	-				21.797.500	-	-	0,00	8,80	21.797.500	100,00		
44		Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	21.797.500	-				21.797.500	-	-	0,00	8,80	21.797.500	100,00		
11.	Program Penyelesaian Sengketa Data Gender dan			45.475.700	-				45.475.700	-	2.196.000	4,81	10,00	45.475.700	95,19		
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kesejahteraan Data di Tingkat		45.475.700	-				45.475.700	-	2.196.000	4,81	10,00	45.475.700	95,19		
45		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten Kota	45.475.700	-	Swakelola (Penerima)	-	-	45.475.700	-	2.196.000	4,81	10,00	45.475.700	95,19		
12.	Program Peningkatan Hak			17.245.850	-				17.245.850	-	3.020.000	48,15	46,25	14.245.850	82,61		
		Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan		17.245.850	-				17.245.850	-	3.020.000	17,49	50,00	14.245.850	82,61		
46		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota	17.245.850	-	Swakelola (Penerima)	-	-	17.245.850	-	3.020.000	17,49	50,00	14.245.850	82,61		

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	PLAFOND ANGGARAN (APBD)		DATA KONTRAK					REALISASI			SISA ANGGARAN		LOKASI KEGIATAN	KET
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SWAKELOLA (PENYEDIA)	KONTRAK AWAL (PENYEDIA A. NOMOR)	KONTRAK PERUBAHAN (PENYEDIA B. NOMOR)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI AMANAH MEN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	REPIAH	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pengurusan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewasunggan		187.029.900	-				187.029.900	-	129.969.800	69,51	45,89	127.969.100	100,00		
47		Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	34.000.000	-				34.000.000	-	-	0,00	0,00	34.000.000	100,00		
48		Pengurusan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Pengurusan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	223.029.900	-				223.029.900	-	129.969.800	57,87	85,00	85.969.100	100,00		
13	Program Perlindungan Korban Anak			7.593.950	-				7.593.950	-	1.838.000	24,75	30,89	5.563.950	100,00		
		Pengembangan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota		7.593.950	-				7.593.950	-	1.838.000	24,75	30,89	5.563.950	100,00		
49		Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak	Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak	7.593.950	-	Swakelola (Penyedia)		-	7.593.950	-	1.838.000	24,75	30,89	5.563.950	75,25	guru Ma- leng	
		TOTAL		8.503.811.891	-				8.503.811.891	-	3.896.264.992	38,89	26,84	4.606.103.579	48,88		

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Daerah	Program/Kelembagaan	Indikator Kinerja Program (SKPD) Monev (persen)	Target Kinerja Monev Periode		Berkas/Kelembagaan Monev Periode (persen)		Target Kinerja dan Anggaran Selama Periode 2019 - 2021 (persen)		Berkas/Kelembagaan Selama Periode (Persen)						Anggaran Selama Periode (Rp. Miliar)		Target Kinerja dan Anggaran Selama Periode 2021 (Rp. Miliar)		Anggaran Selama Periode 2021 (Rp. Miliar)		Target Kinerja dan Anggaran Selama Periode 2021 (Rp. Miliar)			
				2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020		2021		2019		2020	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kecamatan Mungli																									
		MODALIS PENGUSAHA (MUSKOPAS) POKJAS POKJAWANANAN	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)	90%		100.00		100										100.00	90%						
			Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)	90%		100.00	8.000.000	100	8.000.000.00	1.000.000.000								1.000.000.000	90%	4.00%		1.000.000.000	90%		
			Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)	90%		100.00		100											100.00	90%					
			Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)	90%		100.00		100											100.00	90%					
		Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persepsi Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, strategi bisnis, rencana kerja dan anggaran usaha (Rencana usaha)			90%	9.000.000	90	9.000.000.00										9.000.000.00	90%	1.00%	9.000.000.00	90%		

		Administrasi Struktur Organisasi Berkas	Transkrip dan administrasi struktur organisasi dan fungsi (Peta)			0,00		0	219.387,33	33	21.938.733	33	46.280,70				0	19.958,02	333,33%	16,37%	3,00	19.958,02	1,00%	1,00%
		Penelitian Komparasi antara Lain/Perbandingan Struktur Grafik	Jurnal Peta Kelengkapan struktur Lain/Perbandingan Perbandingan antara Struktur/ Peta			0,00		0	9.459,08	8	-	8	-				0	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penelitian Penelitian dan Penggunaan Grafik	Jurnal Peta Penelitian dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	220.521,78	1	-	1	80.000				0	80.000	10,00%	0,07%	0,00	80.000	1,00%	1,00%
		Penelitian Penelitian dan Penggunaan Grafik	Jurnal Peta Penelitian dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	114.029,17	8	-	8	-				0	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penelitian Struktur Logistik Grafik	Jurnal Peta Struktur Logistik yang digunakan (Grafik)			0,00		0	119.480,00	1	9.500,00	1	1.000,00				0	11.000,00	10,00%	16,47%	0,00	11.000,00	0,00%	0,00%
		Penelitian Struktur dan Penggunaan Grafik	Jurnal Peta Struktur dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	41.700,00	8	-	8	-				0	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penelitian Struktur dan Penggunaan Grafik	Jurnal Struktur dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	1.000,00	8	870,00	8	1.000,00				0	1.070,00	10,00%	40,00%	0,00	1.070,00	0,00%	0,00%
		Penelitian Struktur dan Penggunaan Grafik	Jurnal Struktur dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	160.901,18	1	41.024,24	1	18.620,54				0	59.645,77	36,47%	47,85%	0,00	59.645,77	0,00%	0,00%
		Pengujian Struktur dan Penggunaan Grafik	Jurnal Struktur dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	185.850,54	-	-	1	-				0	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pengujian Struktur dan Penggunaan Grafik	Jurnal Struktur dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	81.700,00	-	-	-	-				0	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pengujian Struktur dan Penggunaan Grafik	Jurnal Struktur dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	411.284,54	-	-	8	-				0	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pengujian Struktur dan Penggunaan Grafik	Jurnal Struktur dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	230.800,00	88	46.781,27	88	18.375,10				0	11.104,17	888,89%	30,35%	0,00	11.104,17	0,00%	0,00%
		Pengujian Struktur dan Penggunaan Grafik	Jurnal Struktur dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	1.000,00	1	-	1	-				0	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pengujian Struktur dan Penggunaan Grafik	Jurnal Struktur dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	15.000,00	1	11.000,00	1	8.000,00				0	21.700,00	14,44%	30,54%	0,00	21.700,00	0,00%	0,00%
		Pengujian Struktur dan Penggunaan Grafik	Jurnal Struktur dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	180.800,00	1	27.640,00	1	27.700,00				0	18.370,00	10,16%	32,34%	0,00	18.370,00	0,00%	0,00%
		Pengujian Struktur dan Penggunaan Grafik	Jurnal Struktur dan Penggunaan Grafik yang digunakan (Peta)			0,00		0	280.700,00	8	-	8	-				0	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%

		RESDORJE FONDASI/TAMBAH BUDGET DAN PERBENTUKAN PERSENTASE							438.000.000		0.000.000		75.000.000					10.000.000		20.000.000		10.000.000		0.00%
		Program Pengembangan Badan PUS dan Lembaga Pengelola Kelangkaan Kebudayaan	Lembaga Persepsi DAK-1 yang mendukung DAK-1 PUS (DAK-1)			0.00		10	30.000.000				10.000.000					10.000.000	0.00%	0.00%	0.00	10.000.000	0.00%	0.00%
		Contributional Research Program (GMP) Pembinaan PUS	7 Unit (GMP) yang Membina dan Dibina (Pembinaan PUS) Pengembangan Badan PUS (Kebudayaan Pengembangan GMP)			0.00		0	30.000.000				10.000.000					10.000.000	0.00%	0.00%	0.00	10.000.000	0.00%	0.00%
		Aktivitas Penelitian (AP) Pembinaan-Pembinaan PUS (GMP, PUS)	7 Unit (Pembinaan) yang Membina dan Dibina (Pembinaan PUS) Pengembangan Badan PUS (GMP, PUS) Pembinaan-Pembinaan PUS (GMP, PUS) Pembinaan-Pembinaan PUS (GMP, PUS)			0.00		0											0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%
		Pembinaan-Pembinaan Badan PUS, Badan, SPP, dan PUS yang Membina dan Dibina Kebudayaan	Pembinaan-Pembinaan (GMP)			0.00		0	375.000.000	70	1.000.000	70	30.000.000					10.000.000	0.00%	0.00%	0.00	10.000.000	0.00%	0.00%
		Aktivitas Penelitian (AP) Pembinaan-Pembinaan PUS (GMP, PUS) dan GMP	7 Unit (GMP) Membina dan Dibina (Pembinaan PUS) Pembinaan-Pembinaan PUS (GMP, PUS) Pembinaan-Pembinaan PUS (GMP, PUS) Pembinaan-Pembinaan PUS (GMP, PUS)			0.00		10	375.000.000	0	0.000.000	0	30.000.000					10.000.000	0.00%	0.00%	0.00	10.000.000	0.00%	0.00%
		Kelembagaan Pengembangan Lembaga Pembinaan-Pembinaan Kebudayaan	Pembinaan-Pembinaan Pengembangan Kelangkaan (GMP)			0.00		0	0.000.000										0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%
		Aktivitas Penelitian (AP) Pembinaan-Pembinaan Lembaga, PUS (GMP, PUS) Pembinaan-Pembinaan GMP (Kebudayaan)	7 Unit (Lembaga) Pembinaan-Pembinaan Pembinaan-Pembinaan Pembinaan-Pembinaan Pembinaan-Pembinaan Pembinaan-Pembinaan Pembinaan-Pembinaan			0.00		0	0.000.000										0.00%	0.00%	0.00		0.00%	0.00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dikaji berdasarkan capaian kinerja pada indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat terlihat pada Tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun Ke (%)					Rasio Pencapaian tahun ke (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penurunan PMKS per tahun				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-5,93	4,92	-8,79	0,76	18,39	-1186	984	-1758	152	3678
2	Persentase PMKS yang tertangani				80	80	80	80	80	83,89	94,20	97,69	98,80	98,29	104,86	117,75	122,11	123,50	122,86
3	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial						100	100	100			41,72	42,14	38,60			41,72	42,14	38,60
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100					100	100	100			100	100	100			100	100	100
5	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial						100	100	100			83,01	97,25	88,31			83,01	97,25	88,31
6	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100					100	100	100			100	100	100			100	100	100
7	Taman Makam Pahlawan yang tertata						90	100	100			90	100	100			100	100	100
8	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan						100	100	100			100	100	100			100	100	100
9	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah						75	75	75			73,33	78,70	78,80			97,77	104,93	104,93
10	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah						100	100	100			100	100	100			100	100	100
11	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						100	100	100			100	100	100			100	100	100

12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				42,6 2	43,9 1	45,1 1	46,3 5	47,00	43,0 7	53,1 1	53,0 2	53,0 2	53,4 2	102, 53	120, 95	117, 53	117, 53	113, 66
13	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan					5,70	5,50	5,30	5,10		2,85	4,13	3,73	5,25		50	75,0 9	70,3 8	102, 94
14	Persentase ARG pada belanja langsung APBD						0,5	0,5	0,5			0,35	35,7 5	48,4 8			70	100	9696
15	Persentase layanan perlindungan perempuan						100	100	100			100	100	100			100	100	100
16	Persentase keluarga yang terlayani						-	100	100			-	100	100			-	100	100
17	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)						25	25	25			33,3 3	55,8	75			133, 2	223, 20	300
18	Kabupaten Layak Anak (KLA)				Prata ma	Prata ma	Prata ma	Prata ma	Prata ma	Prata ma	Prata ma	Prata ma	Prata ma	Mady a	100	100	100	100	117, 84
19	Prevalensi kekerasan terhadap anak					5,0	4,8	4,6	4,4		1,92	1,81	959	12,9 7		38,5	37,7	208, 48	294, 77
20	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)						Prata ma	Prata ma	Prata ma			Prata ma	Prata ma	Mady a			Prata ma	Prata ma	Mad ya
21	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten						100	100	100			100	100	100			100	100	100

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung juga merupakan salah satu pemangku urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Urusan Sosial. Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah disusun dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Target pencapaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan Dasar yang diperoleh pada setiap tahunnya.

Pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan dasar yang tertuang dalam Program dan Kegiatan adalah pemberian bantuan permakanan atau pemenuhan kebutuhan pangan/pokok bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan dan pengemis.

Selain itu pemenuhan kebutuhan lainnya berupa fasilitasi untuk pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan alat bantu, pemenuhan penyediaan Administrasi Kependudukan, fasilitasi pengobatan atau bantuan biaya berobat kepada pihak lain, serta penyediaan sandang.

Realisasi dari pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023 dapat tergambar dalam tabel 2.22. berikut :

TABEL 2.22
CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			98.88 %	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		30	30	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	30	30	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	30	30	0	100.00 %	

	3 . Penyediaan permakanan	Orang	30	30	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	30	30	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	30	30	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	30	30	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	30	30	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	30	30	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	30	30	0	100.00 %	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		15	15	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	15	15	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	15	15	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	15	15	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	15	15	0	100.00 %	
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	15	15	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	15	15	0	100.00 %	

	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100.00 %		
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %		
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %		
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15	15	0	100.00 %		
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %		
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti						99.38 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		60	60	0	100.00 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.38 %		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96.92 %		
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	60	60	0	100.00 %		
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	60	60	0	100.00 %		
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	60	60	0	100.00 %		
	4 . Penyediaan sandang	Orang	60	60	0	100.00 %		
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	0	100.00 %		
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	60	60	0	100.00 %		
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	60	60	0	100.00 %		
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	60	60	0	100.00 %		
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	3	2	60.00 %		
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %		
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %		
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	60	60	0	100.00 %		
	13 . Layanan rujukan	Orang	60	60	0	100.00 %		

4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100.00 %	
	Ya ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khusus nya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		39	39	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	39	39	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	39	39	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	39	39	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	4	4	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	3	3	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	39	39	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	4	4	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	4	4	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	39	39	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	39	39	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	39	39	0	100.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					95.00 %
	Ya Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %

	(80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		24	24	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	75.00 %	
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	1	0	1	0.00 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	24	24	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1	1	0	100.00 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1	0	1	0.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	24	24	0	100.00 %	

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis dari program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama Triwulan II Tahun 2024) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyesuaian gaji dan tunjangan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Penambahan dan penyesuaian diklat sesuai Tupoksi pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Penambahan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga dan penyesuaian dan Anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah pada kegiatan Administrasi umum perangkat daerah;
4. Penambahan anggaran dan penyesuaian, pengadaan dua unit kendaraan roda dua, pengadaan mebel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penambahan dan penyesuaian anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penambahan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyesuaian anggaran – pengurangan jumlah penerima penghargaan veteran dan penambahan sub kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna pada Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah (PSKS) Kabupaten/Kota;
8. Pengurangan dan Penyesuaian Anggaran / Pergeseran untuk sub kegiatan yang membutuhkan pada kegiatan baik di urusan Sosial maupun Urusan PPA.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Setelah diidentifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, maka isu strategis yang akan diangkat diantaranya :

- Timbulnya kemandirian PMKS dan Peningkatan Kekuatan Sosial Masyarakat.
- Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bagi masyarakat.
- Fenomena berbagai kasus kemiskinan, perempuan, keluarga, remaja dan anak dapat muncul sebagai dampak kebijakan Pemerintah atau implikasi dari Dinamika Perubahan Sosial Budaya, politik dan ekonomi masyarakat.
- Adanya dinamika perubahan lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik

berimplikasi langsung atau tidak langsung terhadap proporsi perempuan yang menduduki jabatan eksekutif, kurang sinerginya kegiatan sesama lembaga perempuan dan rendahnya aksesibilitas perempuan di Bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi dan hukum.

2.4. Review terhadap Perubahan RKPD

Terhadap review Perubahan Renja Perangkat Daerah kegiatan telaahan yang dilakukan adalah mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam Perubahan RKPD kemudian membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi keseluruhan program dan kegiatan tahap-tahap sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 2.30. berikut :

[illegible]

Perubahan RUPB 2021						Revisi Analisis Kebutuhan 2021						Catatan Penting		
No	Program dan Kegiatan		Indikator	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program dan Kegiatan		Indikator	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Sub Kegiatan	2	Penyediaan Jasa Konsultansi, Standar Daya, As dan Lainnya	Kelembagaan	Analisis Laporan Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Standar Daya As dan Lainnya yang Disubditkan	12 Laporan		Sub Kegiatan	2	Penyediaan Jasa Konsultansi, Standar Daya, As dan Lainnya	Kelembagaan	Analisis Laporan Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Standar Daya As dan Lainnya yang Disubditkan	12 Laporan	
	Sub Kegiatan	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelembagaan	Analisis Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disubditkan	11 Laporan		Sub Kegiatan	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelembagaan	Analisis Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disubditkan	11 Laporan	
	Kegiatan	Perencanaan Program MDA Tahunan Pemangku Utama Pemerintahan Daerah	Kelembagaan	Menyusun rencana dalam bentuk buku	6 Buku	100.741,000	Kegiatan	Perencanaan Program MDA Tahunan Pemangku Utama Pemerintahan Daerah	Kelembagaan	Menyusun rencana dalam bentuk buku	6 Buku	100.741,000	Pas. 7.200.000 untuk dan 1 untuk + 400.000 + 100.000	

Perubahan RKPD 2022						Hasil Analisis Realisasikan 2022						Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan/Strategi dan Penyelenggaraan Pelaksanaan P3 (termasuk PPS)	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Menghadapi Advokasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Program/Program Gender (P3G) Termasuk/Perencanaan Penyelenggaraan Regional/Lokal (P3G), Kecamatan Kabupaten Kota	10 Persentase Dampak	0	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelaksanaan P3 (termasuk PPS)	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Menghadapi Advokasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Program/Program Gender (P3G) Termasuk/Perencanaan Penyelenggaraan Regional/Lokal (P3G), Kecamatan Kabupaten Kota	10 Persentase Dampak	0		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Program/Program Fasilitasi Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan Kabupaten Kota		Kebijakan : Terlembaganya Organisasi perempuan	10 Organisasi	75.477.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Program/Program Fasilitasi Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan Kabupaten Kota		Kebijakan : Terlembaganya Organisasi perempuan	10 Organisasi	75.477.000		
			Hasil : Meningkatkan peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 %				Hasil : Meningkatkan peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 %			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Program/Program dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Menghadapi Advokasi dan Penyelenggaraan Kebijakan Penyelenggaraan Program/Program Fasilitasi Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kecamatan Kabupaten Kota	10 Organisasi	75.477.000	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Program/Program dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Menghadapi Advokasi dan Penyelenggaraan Kebijakan Penyelenggaraan Program/Program Fasilitasi Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kecamatan Kabupaten Kota	10 Organisasi	75.477.000		
	Kegiatan : Program dan Penyelenggaraan Lembaga Peradilan Layanan Persepsi dan Program Kecamatan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Terlembaganya Forum Peradilan Kabupaten Babelug	1 Lembaga	12.275.000	Kegiatan : Program dan Penyelenggaraan Lembaga Peradilan Layanan Persepsi dan Program Kecamatan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Terlembaganya Forum Peradilan Kabupaten Babelug	1 Lembaga	12.275.000		
			Hasil : Meningkatkan layanan Persepsi dan Program Kecamatan Kabupaten Kota	100 %				Hasil : Meningkatkan layanan Persepsi dan Program Kecamatan Kabupaten Kota	100 %			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Lembaga Peradilan Layanan Persepsi dan Program Kecamatan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah Lembaga Peradilan Layanan Persepsi dan Program Kecamatan Kabupaten Kota yang Menghadapi Advokasi dan Penyelenggaraan	1 Lembaga	10.905.000	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Lembaga Peradilan Layanan Persepsi dan Program Kecamatan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah Lembaga Peradilan Layanan Persepsi dan Program Kecamatan Kabupaten Kota yang Menghadapi Advokasi dan Penyelenggaraan	1 Lembaga	10.905.000		
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kemitraan, Informasi dan Literasi (KIL) Penyelenggaraan Program Kecamatan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah Kemitraan Kemitraan Informasi dan Literasi (KIL) Penyelenggaraan program Kecamatan Kabupaten Kota	1 Dik	17.542.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kemitraan, Informasi dan Literasi (KIL) Penyelenggaraan Program Kecamatan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah Kemitraan Kemitraan Informasi dan Literasi (KIL) Penyelenggaraan program Kecamatan Kabupaten Kota	1 Dik	17.542.000		
1	Program : PROGRAM PERLINDUNGAN PERSEPSI		Persepsi layanan perlindungan perempuan	100 %	36.756.400	1	Program : PROGRAM PERLINDUNGAN PERSEPSI		Persepsi layanan perlindungan perempuan	100 %	36.756.400	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Kemitraan terhadap Program/Program Lapangan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Terlembaganya pelayanan perlindungan perempuan	100 %	11.044.100	Kegiatan : Penyelenggaraan Kemitraan terhadap Program/Program Lapangan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Terlembaganya pelayanan perlindungan perempuan	100 %	11.044.100		
			Hasil : Peningkatan program/program	100 %				Hasil : Peningkatan program/program	100 %			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Kemitraan terhadap Program/Program Lapangan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah Dukungan/Hasil Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Kemitraan terhadap Program/Program Lapangan Kabupaten Kota	1 Dik	17.648.300	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Kemitraan terhadap Program/Program Lapangan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah Dukungan/Hasil Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Kemitraan terhadap Program/Program Lapangan Kabupaten Kota	1 Dik	17.648.300		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Kemitraan/Program/Program Lapangan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah lembaga yang terlembaga	3 Lembaga	12.275.000	Kegiatan : Penyelenggaraan Kemitraan/Program/Program Lapangan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah lembaga yang terlembaga	3 Lembaga	12.275.000		
			Hasil : Meningkatkan layanan perlindungan perempuan	100 %				Hasil : Meningkatkan layanan perlindungan perempuan	100 %			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kemitraan/Program/Program Lapangan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah Lembaga Terlembaga yang Menghadapi Koordinasi dan Dukungan Penyelenggaraan Kemitraan/Program/Program Lapangan Kabupaten Kota	100 %	12.275.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Dukungan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kemitraan/Program/Program Lapangan Kabupaten Kota	Kabupaten Babelug	Kebijakan : Jumlah Lembaga Terlembaga yang Menghadapi Koordinasi dan Dukungan Penyelenggaraan Kemitraan/Program/Program Lapangan Kabupaten Kota	100 %	12.275.000		
10	Program : PENINGKATAN KUALITAS KECILAN		Persepsi layanan yang terlayani	100 %	11.044.400	10	Program : PENINGKATAN KUALITAS KECILAN		Persepsi layanan yang terlayani	100 %	11.044.400	

Perubahan RUPM 2024						Realisasi Anggaran Kelembahan 2024						Catatan Penting									
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)										
	Kegiatan : Pemenuhan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Layanan layanan yang efisien	1	Lembaga	12.032.000	Kegiatan : Pemenuhan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Layanan layanan yang efisien	1	Lembaga	12.000.000									
			Hasil : Meningkatkan layanan layanan	100 %					Hasil : Meningkatkan layanan layanan	100 %											
	Sub Kegiatan : Alokasi Kegiatan dan Pengembangan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Alokasi Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	1	Lembaga	12.032.000	Sub Kegiatan : Alokasi Kegiatan dan Pengembangan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Alokasi Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	1	Lembaga	12.000.000									
			Hasil : Meningkatkan layanan layanan	100 %					Hasil : Meningkatkan layanan layanan	100 %											
10. Program : PROGRAM PENGALANGAN ADEQUATE DATA						10. Program : PROGRAM PENGALANGAN ADEQUATE DATA															
Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Layanan dan Anak (SILA)						Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Layanan dan Anak (SILA)															
1. Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Sistem dan Anak dalam Sistem Informasi Layanan dan Anak (SILA) Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	43.675.700	1. Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Sistem dan Anak dalam Sistem Informasi Layanan dan Anak (SILA) Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	43.675.700										
												Hasil : Data lengkap, akurat dan mudah diakses	100 %								
Sub Kegiatan : Penyajian Data Sistem dan Anak di Perangkat Elektronik Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data yang akurat	1	Data	43.675.700	Sub Kegiatan : Penyajian Data Sistem dan Anak di Perangkat Elektronik Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data yang akurat	1	Data	43.675.700										
12. Program : PROGRAM PEMBIYARAN ANAK (PIA)						12. Program : PROGRAM PEMBIYARAN ANAK (PIA)															
Tingkat Kelengkapan Layak Anak (KLA)						Tingkat Kelengkapan Layak Anak (KLA)															
1. Kegiatan : Pelaksanaan PIA pada Layanan Pendidikan, Suplementasi dan Dana Usaha Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Makna	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan PIA pada Layanan Pendidikan, Suplementasi dan Dana Usaha Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Makna	11.713.000										
Sub Kegiatan : Kewirausahaan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Kewirausahaan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
2. Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	2. Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pengembangan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pengembangan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
13. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						13. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
14. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						14. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
15. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						15. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
16. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						16. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
17. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						17. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
18. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						18. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
19. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						19. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
20. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						20. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
21. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						21. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
22. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						22. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
23. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						23. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
24. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						24. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
25. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						25. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK															
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani melalui layanan layanan															
1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	1. Kegiatan : Pelaksanaan Kemandirian, Inovasi dan Tindakan Pemenuhan Hak Anak yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Alokasi dan Pengembangan Program Pendidikan dan Inovasi, Pengembangan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Merupakan IGD dan Anak yang Wajar Belajar dalam Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Kebijakan : Tersedianya informasi dan data	1	Data	11.713.000										
26. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEMERDEKAAN ANAK						26. Program : PROGRAM PEMBIYARAN KEM															

Penilaian RKPD 2022						Hasil Analisis Kritisikan 2022						Catatan Penting
No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.	Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Telinga-Tanduk yang melibatkan para pihak di tingkat daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Revisi : Tidak : Meningkatkan sistem pertanggung-jawaban untuk di tingkat Dinas Kesehatan	100 % 100 %	1.127.500	1.	Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Telinga-Tanduk yang melibatkan para pihak di tingkat daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Revisi : Tidak : Meningkatkan sistem pertanggung-jawaban untuk di tingkat Dinas Kesehatan	100 % 100 %	1.127.500	
	Sub Kegiatan : 2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan (KPL)	Kabupaten Bontang	Revisi : Tidak : Indeks (AMPE) yang menunjukkan layanan	1 1	1.127.500		Sub Kegiatan : 2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan (KPL)	Kabupaten Bontang	Revisi : Tidak : Indeks (AMPE) yang menunjukkan layanan	1 1	1.127.500	
1.	Kegiatan : Program dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Menurunkan Perilaku Berbahaya Ekstrem Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Revisi : Tidak : Terselenggaranya layanan pertolongan untuk di tingkat Dinas Kesehatan Meningkatnya sistem pertanggung-jawaban untuk di tingkat Dinas Kesehatan	100 % 100 %	35.200.000	1.	Kegiatan : Program dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Menurunkan Perilaku Berbahaya Ekstrem Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Revisi : Tidak : Terselenggaranya layanan pertolongan untuk di tingkat Dinas Kesehatan Meningkatnya sistem pertanggung-jawaban untuk di tingkat Dinas Kesehatan	100 % 100 %	35.200.000	
	Sub Kegiatan : 2. Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perilaku dan Program bagi AMPS tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Revisi : Tidak : Indeks (SDM) penyedia layanan yang seluruhnya menunjukkan efektifitas pertolongan dan penanganan AMPS	40 1	35.200.000		Sub Kegiatan : 2. Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perilaku dan Program bagi AMPS tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kabupaten Bontang	Revisi : Tidak : Indeks (SDM) penyedia layanan yang seluruhnya menunjukkan efektifitas pertolongan dan penanganan AMPS	40 1	35.200.000	1312 User Pedia (SD)
Jumlah					10.114.802.800						10.114.802.800	

Dari hasil pembandingan tersebut dapat terlihat, bahwa Program/ Kegiatan maupun sub kegiatan sudah masuk dalam Perubahan RKPD 2024.

Tabel 2.31.

Program dan Kegiatan yang tidak muncul dalam RKPD 2025

No.	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Plafon Anggaran	Catatan
-	-	-	-	-	-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten dikumpulkan berdasarkan hasil - hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Berikut adalah daftar usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat

Tabel 2.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun
Perubahan 2024 Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
1.	-	-	-	-

Untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, belum ada usulan yang masuk pada Musrenbang Perubahan 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2024 adalah

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa untuk mencapai tujuan nasional perlu adanya penguatan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu melalui program yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan TMP
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
9. Program Perlindungan Perempuan
10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
13. Program Perlindungan Khusus Anak.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai dalam pada tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat daerah seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tujuan pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Belitung, yaitu :

- 1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS
- 2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
- 3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Hasil (sasaran) yang akan dicapai secara nyata setiap tahunnya selama 3 tahun dari tahun 2024 sampai dengan 2026, yaitu :

- 1. Meningkatnya penanganan PMKS
- 2. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
- 3. Meningkatnya kualitas hidup anak.

3.2.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Mendukung pencapaian visi dan Misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJPD / RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yaitu :

Terwujudnya Kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dan mewujudkan Misi:

Misi Kesatu	Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjuang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misi Kedua	Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah.

- (2) Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan ***Sustainable Development Goal's*** (SDG's). Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2022 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Bagian SDG's yang di dukung oleh perangkat Daerah yaitu SDGs ke - 1. Menghapus Kemiskinan, 2. Menghapus Kelaparan, 3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, 4. Pendidikan Bermutu, 5. Kesetaraan Gender, 8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, 10. Mengurangi Ketimpangan, 12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab, dan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.
- (3) Mendukung Pencapaian NSPK dan SPM, Program dan kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). NSPK/SPM yang didukung oleh program dan kegiatan perangkat daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti
 - d. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar Panti
 - e. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.
- (4) Mendukung pencapaian 16 Program Inovatif kepala daerah yaitu Program Sehati (Sistem Pelayanan Kesehatan Terintegrasi), Program Simpor (Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga), Program Ambong (Program asistensi dan asupan makanan tambahan untuk balita dan ibu mengandung) dan Program SOS Center (Berupa Telp ke 505/ Aplikasi masyarakat menghubungi SOS Center : Damkar, Ambulance, PMI, Tagana, BNPB, POL PP)
- (5) Mendukung Pencapaian KEK
- (6) Mendukung KSPN
- (7) Mendukung KPPN

Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung merencanakan 13 (tiga belas) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan serta 55 (Lima Puluh Lima) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 10.314.852.053,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta DELapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah). Dengan lokasi kegiatan sebagai berikut : Luar Daerah dan di Kecamatan Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong dan Selat Nasik serta Luar Daerah Kabupaten Belitung.

Rumusan Perubahan Rencana program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 sesuai dengan dokumen Perubahan RKPD 2024 terdapat dalam Tabel 3.1 berikut :

50 | Page

No.	Kode			Urutan/Urutan Urutan Prioritas/Urutan Prioritas dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Berkurang/Bersambah APBD P (Rp-/+)	Lokasi	Sumber Dana	Kecompokan	
						Sebelum	Setelah	BKPD 2024	APBD 2024	BKPD Persetujuan 2024					Urutan Persetujuan - Juli
1	06			01	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
1	06	02		1	Program PENGEMBANGAN SOSIAL	Kebum - Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100 %	100 %	167.914.000	227.436.000	227.436.000	340.934.000	121.000.000	Kabupaten	
1	06	02	1.01	1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKS) Kabupaten Kota	Kebum - Jumlah PKS yang aktif Hasil - Pemahaman Desa	161 - PKS 100 %	161 - PKS 100 %	167.914.000	227.436.000	227.436.000	340.934.000	121.000.000		APBD Kabupaten
1	06	02	1.01	2	Sub Kegiatan Pengembangan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kota	Kebum - Jumlah orang terampil Pemukiman Kecamatan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kota	0 orang 0 %	0 orang 0 %	28.770.000	0.770.000	0.770.000	0.770.000	-	Kabupaten	APBD Kabupaten
1	06	02	1.01	3	Sub Kegiatan Pengembangan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kecamatan Kabupaten Kota	Kebum - Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kemampuan Kecamatan Kabupaten Kota	17 Keluarga 100 %	17 Keluarga 100 %	131.170.000	331.170.000	331.170.000	120.170.000	1.000.000	Kabupaten	APBD Kabupaten & Dana
1	06	02	1.01	4	Sub Kegiatan Pengembangan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota	Kebum - Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kemampuan Kecamatan Kabupaten Kota	0 Lembaga 0 %	0 Lembaga 0 %	0	0	0	120.000.000	120.000.000	Kabupaten	APBD Kabupaten
1	06	02	1.01	5	Sub Kegiatan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Kelembagaan Kecamatan Kabupaten Kota (LKC)	Kebum - Jumlah Terampil yang dari Hasil Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kelembagaan Kecamatan Kabupaten Kota (LKC) Kecamatan Kabupaten Kota	1 Terampil 100 %	1 Terampil 100 %	100.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kabupaten	APBD Kabupaten
2	06	03		2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MUJIBAH KORAN TIDAK KEBERASAN	Kebum - Persentase Warga Negara Murni Korban Tidak Kebum yang dipindahkan ke Daerah Asing	100 %	100 %	47.236.200	47.236.200	47.236.200	47.236.200	0.000.000	Kabupaten	
1	06	03	2.01	1	Kegiatan Pengembangan Warga Negara Murni Korban Tidak Kebum dan Tindak Diberikan di Daerah Kabupaten Kota untuk Dipindahkan ke Daerah Kabupaten Kota	Kebum - Jumlah Warga Negara Murni Korban Tidak Kebum dan Tindak Diberikan di Daerah Kabupaten Kota untuk Dipindahkan ke Daerah Kabupaten Kota Hasil - Pemahaman Warga Negara Murni Korban - Tindak Kebum dan Tindak Diberikan di Daerah Kabupaten Kota untuk Dipindahkan ke Daerah Kabupaten Kota	12 orang 100 %	12 orang 100 %	47.236.200	47.236.200	47.236.200	47.236.200	0.000.000		APBD Kabupaten
1	06	03	2.01	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemukiman Warga Negara Murni Korban Tidak Kebum dan Tindak Diberikan di Daerah Kabupaten Kota untuk Dipindahkan ke Daerah Kabupaten Kota	Kebum - Jumlah Warga Negara Murni Korban Tidak Kebum dan Tindak Diberikan di Daerah Kabupaten Kota untuk Dipindahkan ke Daerah Kabupaten Kota	12 orang 100 %	12 orang 100 %	47.236.200	47.236.200	47.236.200	47.236.200	0.000.000	Kabupaten	APBD Kabupaten
1	06	04		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANUSIA	Kebum - Persentase peningkatan keahlian pelatihan anak terlantar, lanjut usia dan cacat kelainan yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100 %	100 %	419.236.000	380.600.200	400.420.312	380.284.312	40.146.000		
1	06	04	3.01	1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Peningkatan Kualitas Potensi, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Cacat Kelainan (Peningkatan Potensi di Luar Potensi Sosial)	Kebum - Jumlah Anak terlantar, anak terlantar, lanjut usia, dan cacat kelainan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100 orang 100 %	100 orang 100 %	419.236.000	380.600.200	400.420.312	380.284.312	40.146.000		APBD Kabupaten

No.	Kode				Uraian/Detail Urutan Pemeliharaan Bersih dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target 2024		Page Indirect (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sarana
									Sebelum	Setelah	RPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Urutan Perubahan - Juli			
							Realisasi	Terpapahnya layanan rehabilitasi sosial dalam di luar pasar	100 %	100 %							
1	06	04	2.01	01	Sub Kegiatan	1. Pengadaan Perumahan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sosial dengan Bantuan Uang Muka Kewenangan Kabupaten Kota	100 orang	100 orang	218.671.000	218.671.000	218.671.000	200.131.000	1.990.000	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten
1	06	03	2.01	04	Sub Kegiatan	2. Pembaruan Pelayanan Basmilasi Keluarga	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Basmilasi Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	100 Orang	100 Orang	11.140.750	11.140.750	11.140.750	11.140.750	-	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten
1	06	03	2.01	09	Sub Kegiatan	5. Pembaruan Layanan Data dan Pengkutan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengkutan Kewenangan Kabupaten Kota	100 orang	100 orang	117.804.200	117.804.200	117.804.200	117.804.200	-	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten
1	06	04	2.01	10	Sub Kegiatan	10. Pembaruan Layanan Kabinisasi	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kabinisasi Kewenangan Kabupaten Kota	12 orang	12 orang	12.970.000	12.970.000	12.970.000	12.970.000	-	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten & Pabek
1	06	04	2.01	11	Sub Kegiatan	11. Pembaruan Layanan Kabinisasi	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Kabinisasi Kewenangan Kabupaten Kota	12 orang	12 orang	18.612.500	18.612.500	18.612.500	18.612.500	-	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten
2	06	05			Program	PROGRAM POKOK/KELOMPOK DAN JAMINAN SOSIAL	Terpapahnya perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	667.704.900	677.324.900	677.324.900	644.154.850	11.170.050	Kabupaten Klaten		
1	06	05	2.01		Kegiatan	Pemeliharaan Asuransi Kesehatan	Keluaran	Terpapahnya pemeliharaan asuransi kesehatan	100 Orang	100 Orang	23.276.100	23.276.100	23.276.100	23.276.100	-	Kabupaten Klaten	
							Realisasi	Terpapahnya asuransi kesehatan	100 %	100 %							
1	06	05	2.01	01	Sub Kegiatan	1. Penggantian Asuransi Kesehatan	Keluaran	Jumlah asuransi kesehatan yang digantikan Kewenangan Kabupaten Kota	12 Orang	12 Orang	7.001.100	7.001.100	7.001.100	7.001.100	-	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten
1	06	05	2.01	02	Sub Kegiatan	2. Bantuan Asuransi Kesehatan	Keluaran	Jumlah asuransi kesehatan yang mendapat tegakan Kewenangan Kabupaten Kota	8 Orang	8 Orang	11.264.000	11.264.000	11.264.000	11.264.000	-	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten
1	06	05	2.01		Kegiatan	Pengelolaan Data Fakir Miskin/akutasi Sosial	Keluaran	Data dan informasi yang tidak terakutasi dan PMKS yang terakutasi	100 %	100 %	164.515.900	164.515.900	164.515.900	164.515.900	-	Kabupaten Klaten	
							Realisasi	Data dan informasi yang tidak terakutasi dan PMKS yang akurat	100 %	100 %							
1	06	05	2.02	01	Sub Kegiatan	1. Pengkutan Data Fakir Miskin/akutasi Sosial	Keluaran	Jumlah Kegiatan yang Mendapatkan Pengkutan Data Fakir Miskin/akutasi Sosial	150 Kegiatan	150 Kegiatan	325.140.200	325.140.200	325.140.200	325.140.200	-	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten
1	06	05	2.02	02	Sub Kegiatan	2. Pembaruan Layanan Sosial Kewenangan Kabupaten Kota	Keluaran	Jumlah Kegiatan yang Mendapatkan Layanan Sosial Kewenangan Kabupaten Kota	10 Kegiatan	10 Kegiatan	264.337.700	264.337.700	264.337.700	264.337.700	-	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten
2	06	06			Program	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pemerataan Korban bencana alam dan bencana sosial yang terdampak bencana bencana pabek dan wilayah lainnya	100 %	100 %	424.517.700	424.517.700	424.517.700	424.517.700	-			
1	06	06	2.03		Kegiatan	Pengelolaan Pemeliharaan Masyarakat terdampak Kewenangan Kabupaten Kota	Keluaran	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	100 %	100 %	424.517.700	424.517.700	424.517.700	424.517.700	-	Kabupaten Klaten	APBD Kabupaten
							Realisasi	Terpapahnya korban bencana	100 %	100 %							

No.	Kode	Uraian/Bidang Uraian Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran
				Target 2024		Ragu Indikatif (Rp)				Berikutnya/ Bertambah APBD P (Ya/No)				
				Sebelum	Setelah	RAPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Undian Perubahan - Juli					
1	06.01.01.01	Sub Kegiatan 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Turun Sagu (Dusung)	Kelurahan - Turun Sagu yang dilaksanakan Koordinator, Sosialisasi dan Pelaksanaan Turun Sagu Dusun/Kawenteng Kabupaten/Kota	27 Orang	47 Orang	413.359.500	413.377.500	413.377.500	413.377.500	11.000.000	Tanjungpandan	APBD Kabupaten		
2	06.07	7. Program - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH MAKAM PABLAYAN	Tanah Makam Pablayan yang terdapat	100 %	100 %	86.975.400	11.325.400	11.325.400	11.325.400	-				
3	06.07.01.01	1. Kegiatan - Pemeliharaan Tanah Makam Pablayan Nasional Kabupaten/Kota	Kelurahan - Pelaksanaan pemeliharaan makam makam pablayan Desa - Pemeliharaan makam makam pablayan	100 % 100 %	100 % 100 %	86.975.400 11.325.400	11.325.400 11.325.400	11.325.400 11.325.400	11.325.400 11.325.400	-		APBD Kabupaten		
4	06.07.01.02	Sub Kegiatan 2. Pemeliharaan Tanah Makam Pablayan Nasional Kabupaten/Kota	Kelurahan - Turun Makam yang Tersebut Pemeliharaan pada Tanah Makam Pablayan Kabupaten/Kota	10 Makam	10 Makam	86.975.400	11.325.400	11.325.400	11.325.400	-	Tanjungpandan	APBD Kabupaten		
2		Uraian - ERUAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERIKSAAN PERSEMPULAN DAN PERHIMPUNAN ANAK								-				
2	06	Bidang Uraian - ERUAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERIKSAAN PERSEMPULAN DAN PERHIMPUNAN ANAK								-				
2	06.02	8. Program - PROGRAM PENGARAHUTARAAN GENDER DAN PEMERIKSAAN PERSEMPULAN	Persentase ARGI pada setiap kelompok APBD	14,81 %	16,81 %	455.775.400	479.495.900	479.495.900	479.495.900	-				
3	06.02.01.01	Kegiatan - Pelaksanaan Program Perencanaan Gender (PPG) pada Lembaga Persempul, Kawenteng Kabupaten/Kota	Kelurahan - Lembaga Persempul Daerah yang melaksanakan Kegiatan PPG Desa - Pelaksanaan Kabupaten PPG	10 PPG 10 PPG	10 PPG 10 PPG	56.326.000 56.326.000	56.326.000 56.326.000	56.326.000 56.326.000	56.326.000 56.326.000	-	Kabupaten Bulungan	APBD Kabupaten		
2	06.02.01.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Perencanaan Kabupaten PPG	Kelurahan - Turun Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Perencanaan Kabupaten Perencanaan Gender (PPG) Kawenteng Kabupaten/Kota	1 Diklat	1 Diklat	11.712.000	36.326.000	36.326.000	36.326.000	-	Kabupaten Bulungan	APBD Kabupaten		
2	06.02.01.01.02	Sub Kegiatan Advokasi Kabupaten Pelaksanaan dan Pelaksanaan Perencanaan PPG termasuk PPG	Kelurahan - Turun Persempul Daerah yang Mengikuti Advokasi Kabupaten dan Pelaksanaan Perencanaan Perencanaan Gender (PPG) Turun Persempul Kawenteng Kabupaten/Kota	10 Persempul Daerah	10 Persempul Daerah	11.300.000	0	0	0	-	Kabupaten Bulungan	APBD Kabupaten		
2	06.02.01.01	Kegiatan - Pelaksanaan Perencanaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kawenteng Kabupaten/Kota	Kelurahan - Terlibat dan Organisasi perencana Desa - Mengikuti pada perencana dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10 Organisasi 100 %	10 Organisasi 100 %	399.240.700 100 %	379.497.900 100 %	379.497.900 100 %	379.497.900 100 %	-		APBD Kabupaten		
2	06.02.01.01.02	Sub Kegiatan Advokasi Kabupaten Pelaksanaan dan Pelaksanaan Perencanaan Perencanaan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kelurahan - Turun Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pelaksanaan Kabupaten Perencanaan Perencanaan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kawenteng Kabupaten/Kota	10 Organisasi	10 Organisasi	399.240.700	379.497.900	379.497.900	379.497.900	-	Kabupaten Bulungan	APBD Kabupaten		
2	06.02.01.02	1. Kegiatan - Program dan Pelaksanaan Lembaga Persempul Kawenteng Kabupaten/Kota	Kelurahan - Terlibat dan Forum Forum Kabupaten Bulungan Desa - Mengikuti pada Forum Forum Kabupaten Bulungan	1 Lembaga 100 %	1 Lembaga 100 %	29.276.276	12.276.000	12.276.000	12.276.000	-	Kabupaten Bulungan	APBD Kabupaten		

No.	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024		Rupa Indikator (Rp)				Belanja yang Berubah APBD P (Rp-5)	Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran					
				Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Usulan Perubahan - Juli									
2	00	02	1.01	01	Sub Kegiatan 1. Adversitas Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perilaku Layanan Pendidikan dan Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Kebijakan - Jumlah Layanan Perilaku Layanan Pendidikan dan Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten/Kota yang Mendapat Adversitas dan Peningkatan	1	Layanan	1	Layanan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
2	00	02	1.01	02	Sub Kegiatan 2. Pengembangan Kemitraan, Jejaring dan Jejaring (K2J) Berbasis Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Kebijakan - Jumlah Dokumen Kemitraan Jejaring dan Jejaring (K2J) Berbasis pengembangan program kewirausahaan kabupaten/kota	1	Dok	1	Dok	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
2	00	03		0	Program - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUN	Persentase layanan perlindungan perempuan	100	%	100	%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-			
2	00	03	1.01	1	Regulasi - Penyusunan Kebijakan terkait Program Layanan Perempuan	Kebijakan - Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Program Layanan Perempuan	100	%	100	%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
					Hasil - Persentase layanan terkait		100	%	100	%					-			
2	00	03	1.01	01	Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinergis Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Perempuan Kabupaten/Kota	Kebijakan - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergis Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Perempuan Kabupaten/Kota	1	Dok	1	Dok	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
2	00	03	1.01	2	Regulasi - Penyusunan Kebijakan terkait Program Layanan Perempuan	Kebijakan - Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Program Layanan Perempuan	100	%	100	%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
					Hasil - Jumlah layanan terkait		100	%	100	%					-			
2	00	03	1.01	02	Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinergis Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Perempuan Kabupaten/Kota	Kebijakan - Jumlah Layanan Tidak Lagi Pengaruh yang Menyebabkan Koordinasi dan Sinergis bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	11	Layanan	11	Layanan	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
2	00	04		0	Program - Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang terlayani	100	%	100	%	11.707.000	11.707.000	11.707.000	11.707.000	-			
2	00	04	1.01	1	Regulasi - Penyusunan dan Pengembangan Layanan Perilaku Layanan Pengembangan Kualitas Keluarga dalam Merajutkan K2J dan Hal Anak yang Wajar Keluarga dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan - Jumlah Layanan Perilaku Layanan Pengembangan Kualitas Keluarga dalam Merajutkan K2J dan Hal Anak yang Wajar Keluarga dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Layanan	1	Layanan	27.317.000	27.317.000	27.317.000	27.317.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
					Hasil - Meningkatkan layanan keluarga		100	%	100	%					-			
2	00	04	1.02	01	Sub Kegiatan 1. Adversitas Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perilaku Layanan Pendidikan dan Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Kebijakan - Jumlah Layanan Perilaku Layanan Pendidikan dan Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten/Kota yang Mendapat Adversitas dan Peningkatan	1	Layanan	1	Layanan	27.317.000	27.317.000	27.317.000	27.317.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
2	00	05		0	Program - PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase sumber daya manusia yang terlayani	100	%	100	%	20.671.000	20.671.000	20.671.000	20.671.000	-			
2	00	05	1.01	1	Regulasi - Penyusunan, Pengembangan, Analisis dan Pengujian Data Gender dan Anak dalam Kesejahteraan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan - Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Terwujud	1	Dok	1	Dok	20.671.000	20.671.000	20.671.000	20.671.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
					Hasil - Data terdapat pada dan anak yang terlayani		100	%	100	%					-			
2	00	05	1.01	01	Sub Kegiatan 1. Penyusunan Data Gender dan Anak di Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Kebijakan - Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Terwujud	1	Dokumen	1	Dokumen	20.671.000	20.671.000	20.671.000	20.671.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	

No.	Kode				Terasa/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Belanja Berambah APBD FY (Rp-R)	Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Anggaran
							Setoran	Swasemb	HKPD 2024	APBD 2024	HKPD Perubahan 2024	Uraian Perubahan - Juli				
1	00	06			02 Program - PROGRAM SUPLEMENSI BAK ANAK (PSA)	Status Kelengkapan Laporan Anak (KLA)	Melaju	Melaju	292.549.000	294.265.500	374.295.150	176.343.150	3.502.000			
2	00	06	2.01		1 Kegiatan - Pelaksanaan PDI pada Lembaga Pemasyarakatan, Tahanan, dan Detasir Unitas Kewaspadaan Kabupaten Kota	Kekuatan : Tercapainya pengisian status-KLA	Melaju	Melaju	17.265.850	17.265.850	17.265.850	13.713.450	3.552.000	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
						Rend : Meningkatnya perlindungan terhadap anak	100 %	100 %					-			
2	00	06	2.01	02	Sub Kegiatan 1. Kewaspadaan dan Sistem-sistem Pelindungan Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Kabupaten Kota	Kekuatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Implementasi Pelaksanaan Perawatan Huk dan Kewaspadaan Kabupaten Kota	1 Dik	1 Dik	17.265.850	17.265.850	17.265.850	13.713.450	3.502.000	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
2	00	06	2.01		2 Kegiatan - Pengawasan dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Pemasyarakatan Rutin, Huk dan Kewaspadaan Kabupaten Kota	Kekuatan : Terfungsinya sistem anak Kabupaten Belitang	1 Dik	1 Dik	275.403.950	277.829.900	277.829.900	257.629.900	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
						Rend : Meningkatnya layanan terhadap anak	100 %	100 %					-			
2	00	06	2.01	03	Sub Kegiatan - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perempuan, Anak, dan Anak yang Lembaga Penyelenggara Pelayanan Pemasyarakatan, Rutin, Huk dan Anak yang Lembaga Penyelenggara Pelayanan Pemasyarakatan Kabupaten Kota	Kekuatan : Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Perempuan, Anak, dan Anak yang Lembaga Penyelenggara Pelayanan Pemasyarakatan Rutin, Huk dan Anak yang Lembaga Penyelenggara Pelayanan Pemasyarakatan Kabupaten Kota	1 Dik	1 Dik	12.414.050	14.000.000	14.000.000	14.000.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
2	00	06	2.01	04	Sub Kegiatan - Pengawasan dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Pemasyarakatan Rutin, Huk dan Anak yang Lembaga Penyelenggara Pelayanan Pemasyarakatan Kabupaten Kota	Kekuatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan, Inspeksi, dan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Pemasyarakatan Rutin, Huk dan Anak Kewaspadaan Kabupaten Kota	1 Dik	1 Dik	225.829.900	225.829.900	225.829.900	221.629.900	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
													-			
3	00	07			03 Program - PROGRAM PERLINDUNGAN KEBESAR ANAK	Pemenuhan hak-hak anak-kelompok yang dilindungi hukum terkait kabupaten	100 %	100 %	7.303.950	7.303.950	118.561.650	111.177.000	4.816.550			
1	00	07			1 Kegiatan - Pemenuhan Hak-hak Anak yang dilindungi hukum terkait Kabupaten Kota	Kekuatan :	100 %	100 %	0	0	101.000.000	110.000.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
						Rend : Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa Kelurahan	100 %	100 %					-			
2	00	07			Sub Kegiatan 1. Adopsi dan Pengembangan Program Daerah dalam Pelaksanaan Kabupaten Program Kegiatan Penyelenggaraan KPA	Kekuatan : Jumlah SKM yang memperoleh pelayanan dan penanganan dalam pelaksanaan kegiatan Program Kegiatan Penyelenggaraan KPA	Orang	100 Orang	0	0	101.000.000	110.000.000	-	Kabupaten Belitang	DAK Non Fisik PPA	DAK Non Fisik PPA
1	00	07			2 Kegiatan - Pemenuhan Hak-hak Anak yang dilindungi hukum terkait Kabupaten Kota	Kekuatan :	100 %	100 %	7.303.950	7.303.950	7.303.950	3.177.000	4.806.950	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
						Rend : Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa Kelurahan	100 %	100 %					-			
2	00	07			Sub Kegiatan 2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kekuatan : Jumlah AMPK yang memperoleh layanan	Orang	1 Orang	7.303.950	7.303.950	7.303.950	1.177.000	4.806.950	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
2	00	07	2.01		1 Kegiatan - Pengawasan dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Pelayanan bagi Anak yang Menyelenggarakan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kekuatan : Terfungsinya layanan perlindungan anak di tingkat Desa Kelurahan	100 %	100 %	0	0	90.000.000	90.000.000	-	Kabupaten Belitang	APBD Kabupaten	
						Rend : Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa Kelurahan	100 %	100 %					-			

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Berkas/Berkas APBD - P (Rp)	Estimasi		Sumber Dana
				Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	00.00.00.00.00	Sub Kegiatan 1.1 Peningkatan Kapasitas SDM Lulusan Pasca Sarjana, Perbaikan dan Penguatan bagi SMPK tingkat Daerah Kabupaten Kota	Keluaran Jumlah SDM pascasarjana yang telah dan siap bekerja setelah periode uji dan pengujian - NIKS		40 Orang			10.000.000	10.000.000		DAK Non Fisik	DAK Non Fisik PPA
			Jumlah			8.579.348.423	8.583.811.891	10.004.352.453	10.114.811.850	100.000.000		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah disusun sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 di atas.

Perubahan Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan dokumen RKPD Kabupaten Belitung tahun 2024. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung periode 2024-2026.

Penetapan kinerja tahunan ini merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) dinas yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Adapun beberapa program dan kegiatan yang belum terdapat dalam dokumen Perubahan Renja 2024 dikarenakan penyesuaian dengan tema Perubahan RKPD 2024 dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung serta rasionalisasi anggaran 2024 agar bisa diusulkan kembali melalui Renja 2025 dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan.

Demikian Perubahan Renja tahun 2024 ini disusun, sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2024.

Tanjungpandan, 18 Juli 2024

KEPALA DINAS,

KASHMIN, S.IP, MAB
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690824 199003 1 004

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BELITUNG TAHUN 2024																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								8.579.368.613,00	9.503.811.091,00	10.314.852.053,00	1.735.483.440,00							14.093.854.349,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.561.886.363,00	8.037.577.441,00	8.928.557.353,00	1.366.670.990,00							12.619.329.023,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							7.561.886.363,00	8.037.577.441,00	8.928.557.353,00	1.366.670.990,00							12.619.329.023,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				100 78.80 % %	100 78.80 % %	5.708.170.163,00	6.263.661.441,00	7.089.055.091,00	3.359.123.306,00							9.067.293.469,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Keluaran)				6 Dokumen	6 Dokumen	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00			-	- -	-		88.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.554.320.863,00	5.131.251.041,00	4.949.864.271,00	395.543.408,00			-	- -	-		5.525.896.272,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	4.551.320.863,00	5.128.251.041,00	4.946.864.271,00	395.543.408,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.522.596.272,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah				29 Orang	29 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00			-	- -	-		251.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Membalong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			51.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	289.776.300,00	368.337.400,00	678.597.975,00	388.821.675,00			-	- -	-		618.157.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.470.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.620.500,00	50.620.500,00	220.121.758,00	169.501.258,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			64.251.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	114.759.317,00	100.759.317,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			16.940.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	119.455.800,00	119.455.800,00	119.455.800,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			168.590.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.700.000,00	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.570.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.336.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	128.561.100,00	168.561.100,00	118.561.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang milik daerah				5 Jenis	5 Jenis	339.645.000,00	39.645.000,00	560.804.845,00	221.159.845,00			-	- -	-		209.539.797,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	57.720.000,00	-242.280.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	29 Unit	0,00	0,00	90.820.200,00	90.820.200,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.434.890,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	39.645.000,00	39.645.000,00	412.264.645,00	372.619.645,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			61.104.907,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	220.683.000,00	220.683.000,00	239.083.000,00	18.400.000,00			-	- -	-		250.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.600.000,00	51.600.000,00	70.000.000,00	18.400.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	166.083.000,00	166.083.000,00	166.083.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			182.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik				6 Jenis	6 Jenis	258.750.000,00	458.750.000,00	590.710.000,00	331.960.000,00			-	- -	-		2.123.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	159.250.000,00	159.250.000,00	159.250.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			230.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	47 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	20.000.000,00	220.000.000,00	351.960.000,00	331.960.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial				100 %	100 %	267.914.400,00	227.434.400,00	348.934.400,00	406.759.185,00							674.673.585,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS aktif				165 PSKS	165 PSKS	267.914.400,00	227.434.400,00	348.934.400,00	81.020.000,00			-	- -	-		674.673.585,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	29.739.000,00	5.739.000,00	5.739.000,00	-24.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			82.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Keluarga	17 Keluarga	131.175.500,00	131.175.500,00	126.175.500,00	-5.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			271.227.385,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				-	6 Lembaga	0,00	0,00	126.500.000,00	126.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			185.946.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	1 Sertifikat	106.999.900,00	90.519.900,00	90.519.900,00	-16.480.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			135.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya				100 %	100 %	47.256.200,00	47.256.200,00	41.256.200,00	12.669.050,00							59.925.250,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal				12 Orang	12 Orang	47.256.200,00	47.256.200,00	41.256.200,00	-6.000.000,00			-	-	-		59.925.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	47.256.200,00	47.256.200,00	41.256.200,00	-6.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			59.925.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial				100 %	100 %	419.226.450,00	386.048.250,00	355.284.512,00	623.507.250,00							1.042.733.700,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial				105 Orang	105 Orang	419.226.450,00	386.048.250,00	355.284.512,00	-63.941.938,00			-	-	-		1.042.733.700,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	210.631.000,00	210.631.000,00	208.131.000,00	-2.500.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			217.349.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	11.148.750,00	11.148.750,00	11.148.750,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			485.206.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	117.864.200,00	84.686.000,00	60.041.400,00	-57.822.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			203.225.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	32.970.000,00	32.970.000,00	36.350.862,00	3.380.862,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			83.228.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	46.612.500,00	46.612.500,00	39.612.500,00	-7.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	-			53.724.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial				100 %	100 %	607.784.050,00	677.334.050,00	644.184.050,00	523.929.930,00							1.131.713.980,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpenuhinya pemeliharaan anak terlantar				7 Orang	7 Orang	23.258.100,00	23.258.100,00	23.258.100,00	0,00			-	-	-		133.273.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	7.993.500,00	7.993.500,00	7.993.500,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.111.250,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	15.264.600,00	15.264.600,00	15.264.600,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			63.162.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi				100 %	100 %	584.525.950,00	654.075.950,00	620.925.950,00	36.400.000,00			-	- -	-		998.440.730,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				8740 Keluarga	8740 Keluarga	323.168.200,00	392.718.200,00	367.968.200,00	44.800.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	10 Keluarga	261.357.750,00	261.357.750,00	252.957.750,00	-8.400.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			348.440.730,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana				100 %	100 %	424.559.700,00	424.517.700,00	438.517.700,00	114.369.339,00							538.929.039,00	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Korban bencana yang menerima bantuan sosial				100 %	100 %	424.559.700,00	424.517.700,00	438.517.700,00	13.958.000,00			-	- -	-		538.929.039,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Orang	45 Orang	424.559.700,00	424.517.700,00	438.517.700,00	13.958.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			538.929.039,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan yang tertata				100 %	100 %	86.975.400,00	11.325.400,00	11.325.400,00	17.084.600,00							104.060.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan				100 %	100 %	86.975.400,00	11.325.400,00	11.325.400,00	-75.650.000,00			-	- -	-		104.060.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				55 Makam	55 Makam	86.975.400,00	11.325.400,00	11.325.400,00	-75.650.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			104.060.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.017.482.250,00	1.466.233.650,00	1.386.294.700,00	368.812.450,00							1.474.525.326,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.017.482.250,00	1.466.233.650,00	1.386.294.700,00	368.812.450,00							1.474.525.326,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				36 %	36 %	453.773.450,00	439.498.900,00	439.498.900,00	117.278.177,00							571.051.627,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan kebijakan PUG				10 SKPD	10 SKPD	34.274.500,00	36.326.000,00	36.326.000,00	2.051.500,00			-	- -	-		48.237.060,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	18.772.000,00	36.326.000,00	36.326.000,00	17.554.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			20.793.050,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	15.502.500,00	0,00	0,00	-15.502.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.444.010,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya organisasi perempuan				19 Organisasi	19 Organisasi	390.202.700,00	370.497.900,00	370.497.900,00	-19.704.800,00			-	- -	-		472.938.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				19 Organisasi	19 Organisasi	390.202.700,00	370.497.900,00	370.497.900,00	-19.704.800,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			472.938.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum Puspa Kabupaten Beltung				1 Lembaga	1 Lembaga	29.296.250,00	32.675.000,00	32.675.000,00	3.378.750,00			-	- -	-		49.875.667,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	14.994.250,00	16.993.000,00	16.993.000,00	1.998.750,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.035.667,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	14.302.000,00	15.682.000,00	15.682.000,00	1.380.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.840.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perlindungan perempuan				100 %	100 %	190.575.850,00	677.575.850,00	394.720.850,00	136.424.150,00							327.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan				100 %	100 %	72.668.850,00	72.668.850,00	72.668.850,00	0,00			-	- -	-		192.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	72.668.850,00	72.668.850,00	72.668.850,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			192.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terfasilitasi				3 Lembaga	3 Lembaga	117.907.000,00	604.907.000,00	322.052.000,00	204.145.000,00			-	- -	-		134.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Layanan	11 Layanan	117.907.000,00	604.907.000,00	322.052.000,00	204.145.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			134.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang terlayani				100 %	100 %	27.317.500,00	21.797.500,00	12.132.500,00	6.814.573,00							34.132.073,00	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga keluarga yang dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	27.317.500,00	21.797.500,00	12.132.500,00	-15.185.000,00			-	- -	-		34.132.073,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	27.317.500,00	21.797.500,00	12.132.500,00	-15.185.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.132.073,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)				65 %	65 %	45.671.700,00	45.671.700,00	45.671.700,00	7.829.926,00							53.501.626,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak				1 Dok	1 Dok	45.671.700,00	45.671.700,00	45.671.700,00	0,00			-	- -	-		53.501.626,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	45.671.700,00	45.671.700,00	45.671.700,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.501.626,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)				Madya undefined	Madya undefined	292.749.800,00	274.295.750,00	270.743.750,00	187.950.200,00							480.700.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan status KLA				Madya undefined	Madya undefined	17.265.850,00	17.265.850,00	13.713.850,00	-3.552.000,00			-	- -	-		57.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	17.265.850,00	17.265.850,00	13.713.850,00	-3.552.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung				1 Dok	1 Dok	275.483.950,00	257.029.900,00	257.029.900,00	-18.454.050,00			-	- -	-		423.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	52.454.050,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-18.454.050,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			121.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	223.029.900,00	223.029.900,00	223.029.900,00	0,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	- -			302.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten				-	100 100,00 % %	7.393.950,00	7.393.950,00	223.527.000,00	746.050,00							8.140.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan dan SDM dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak				-	100 %	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	510 Orang	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan				-	100 %	7.393.950,00	7.393.950,00	5.127.000,00	-2.266.950,00			-	- -	-		8.140.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				1 Orang	1 Orang	7.393.950,00	7.393.950,00	5.127.000,00	-2.266.950,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.140.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan				100 %	100 %	0,00	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	48 Orang	0,00	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		J U M L A H																		
									8.579.368.613,00	9.503.811.091,00	10.314.852.053,00	-80.632.669.271,00							14.093.854.349,00	